

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR  
LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN  
TANPA ROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi di Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**ERLANGGA APRILIYAN**  
NPM : 1621020112

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1441 H/2020 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR  
LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN  
TANPA ROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi di Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**ERLANGGA APRILIYAN**  
NPM : 1621020112

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I: Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag.  
Pembimbing II: Drs. Henry Iwansyah, M.A.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1441 H/2020 M**

## ABSTRAK

Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang tidak sehat akan tetapi merokok dikalangan masyarakat adalah sebuah hal yang sudah biasa, masyarakat menganggap merokok sebuah perilaku yang bisa membuat dirinya tenang di karenakan rokok mengandung zat nikotin yang bisa menimbulkan efek sulit ditinggalkan atau kecanduan. Beberapa faktor juga menjadi penyebab dari tidak optimalnya pelaksanaan peraturan daerah ini antara lain : Minim nya sosialisasi dari pihak terkait, kurang nya kesadaran diri dari masyarakat, dan tidak ada instrumen hukum yang spesifik mengenai ketegasan terhadap kawasan tanpa rokok. Rumusan dalam permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung. 2) Bagaimana Implementasi Perda tersebut ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung. 2) Untuk mengetahui penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Sifat penelitian adalah deskriptif, sumber-sumber data langsung dari kepala Satpol PP, sekretaris Satpol PP, kabid PERDA dan bantuan buku-buku yang terkait dengan judul. Sampelnya adalah beberapa perokok, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pemikiran menggunakan metode pemikiran induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implemetasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 5 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok masih belum efektif mengingat masih banyak masyarakat yang tidak sadar untuk mematuhi tentang peraturan tersebut dan kurang nya ketegasan hukum bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erlangga Apriliyan  
NPM : 1621020112  
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implentasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Juni 2020

Penulis



Erlangga Apriliyan  
NPM. 1621020112





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Implentasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung)

**Nama** : Erlangga Apriliyan

**NPM** : 1621020112

**Jurusan** : Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iiyyah)

**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**

**Drs. Henry Arwansyah, M.A.**  
**NIP. 195812071987031003**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frerki, M.S.I**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukaramo Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : “Implentasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung)”, disusun oleh : Erlangga Apriliyan. NPM : 1621020112, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasan Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah.

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**Sekretaris** : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

**Penguji Utama** : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

**Penguji II** : Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag.

**Penguji III** : Drs. Henry Iwansyah, M.A.



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210219930310002**



## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah  
Maha penyayang kepadamu. (QS. An Nisaa: 29)<sup>1</sup>



---

Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 123.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya, Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Nya. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga skripsi ini akanku persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat kesehatan dan kemampuan yang telah diberikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua orang tuaku ayah tercinta (M. Nizam) dan ibunda tercinta (Aina Wati) atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendoakan disetiap waktunya, sabar memberaskanku, menjaga, dan selalu memberikan dukungan penuh dalam moril dan materil, serta curahan kasih dan sayang yang tak terhingga, semoga kelak dapat membanggakan untuk kedua orang tua, dan keluarga lainnya, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kalian didunia maupun akhirat.
3. Kakak tercinta Eka Apriani, M. Zulkarnain, adiku tersayang Muhammad Chaidar Ghibran dan nenekku tercinta Mastawa terimakasih atas segala doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa pemperlancar segala urusan.
4. Almamaterku tercinta dan kepada dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pendidikan terbaik.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Erlangga Apriliyan. Dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 06 April 1998. Penulis adalah anak ke-2 dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak M. Nizam dan Ibu Aina Wati, riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Al-Kautsar Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2010
2. Tingkat Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Negeri 02 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2013
3. Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 06 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2016
4. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Bandar Lampung, 25 Juni 2020

Erlangga Apriliyan

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat serta nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung).** Shalawat serta salam kami semoga tersampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program sarjana satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi, bantu pemikiran, dan partisipasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr.H. Moh. Mukri , M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Khoiruddin, M.H. serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



3. Ketua Jurusan HTN Bapak Frengki, S.E.I., M.SI. dan Sekertaris Jurusan HTN Bapak Hervin Yoki Pradikta,M.H.I
4. Pembimbing I Bapak Dr.Alamsyah,S.Ag.,M.Ag. dan Pembimbing II Bapak DRS. Henry Iwansyah,M.A. yang telah banyak meluanghkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dn Ibu Dosen, serta para staf karyawan Fakultas Syariah.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberi informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Kepala Satpol PP, Sekertaris, Kabid PERDA dan pegawai-pegawai Satpol PP Manager yang telah meluangkan waktunya dan kesediaannya untuk meneliti skripsi ini.
8. Temen terdekatku Rani Afrinah yang telah memberi motivasi dan semangat serta dukungan kepada penulis semoga diberikan keberkahan dan sukses. Amin.
9. Untuk sahabatku Warson, Yogi Indrawan, Dery Aprian Anwar, M. Ican Wicaksono yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penulis semoga diberikan keberkahan dan sukses. Amin.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan HTN angkatan 2016, khususnya kelas A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaannya, canda dan tawa selama ini.
11. Kawan-kawan KKN 58 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kenangan selama KKN.
12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan Taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarobbala'lamin.

Bandar Lampung, 25 Juli 2020

Penulis

Erlangga Apriliyan

NPM. 1621020112





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah .....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b>	
A. Hukum Islam, Prinsip, dan Kaidah-kaidah nya.....	18
1. Pengertian Hukum Islam .....	18
2. Sumber Hukum Islam .....	20
3. Prinsip Hukum Islam .....	30
4. Kaidah- kaidah Hukum Islam .....	44
B. Rokok dan Bahaya .....	47
1. Pengertian Rokok.....	47
2. Sejarah Rokok.....	50
3. Maslahat dan Mudarat Rokok.....	54
C. Hukum Rokok dalam Islam.....	56
D. Perda Kota Bandar Lampung Tentang Rokok.....	59
E. Tinjauan Pustaka .....	67

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

A. Bentuk – Bentuk Pelaksanaan Kerja Satpol PP .....	66
1. Wilayah Pelaksanaan .....	66
2. Hasil Pelaksanaan .....	67
B. Petugas Pelaksanaan Satpol PP .....	68
1. Satuan Polisi Pamong Praja .....	68
2. Sejarah Singkat Satpol PP .....	70
3. Tugas dan Fungsi Satpol PP .....	72
4. Melaksanakan Kewenangan Satpol PP Dalam Menyelenggarakan PERDA Kota Bandar Lampung NO.5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	73
5. Visi dan Misi Satpol PP Kota Bandar Lampung .....	75
6. Dinamika Satpol PP Kota Bandar Lampung .....	76
7. Struktur Satpol PP Kota Bandar Lampung .....	78

### **BAB IV : ANALIS PENELITIAN..... 79**

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	79
B. Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung .....	80

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	85
B. Rekomendasi .....	86

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami tujuan penelitian skripsi ini maka penulis akan menegaskan beberapa istilah dalam judul skripsi sebagai berikut. Adapun judul skripsi ini adalah “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NO 5 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (*Studi Kota Bandar Lampung*)”

1. **Implementasi** adalah merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata *implementation* yang artinya pelaksanaan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut bahasa Indonesia artinya penerapan, pelaksanaan.<sup>3</sup>
2. **Peraturan Daerah (Perda)** adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
3. **Kawasan Tanpa Rokok** adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau.
4. **Perspektif** adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>4</sup> Perspektif yang dimaksud yaitu pandangan hukum Islam tentang penerapan peraturan.

---

<sup>2</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 311.

<sup>3</sup> Haizar MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Referensi Perpustakaan, 2013), h. 244

daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok.

5. **Hukum Islam** merupakan rangkaian dari “Hukum” dan kata “Islam” kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam Bahasa Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan juga dalam Bahasa Indonesia baku. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini meningkat untuk semua yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan sub judul di atas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu penelitian guna mengetahui bagaimana kebijakan PERDA Kota Bandar Lampung tentang pengaturan wilayah kawasan tanpa rokok dan implentasinya dilihat dari Perspektif Hukum Islam.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan peneliti, di antaranya sebagai berikut :

1. Keberadaan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok mengandung kontroversi bagi sebagian masyarakat yang mendukung dengan sebagian masyarakat yang menolak, akibatnya menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat

---

<sup>4</sup> P.Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2006), h. 275.

<sup>5</sup> Amir Sarifiddin, *Garis Garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana Pedana Media Grub, 2010), h. 9



terjadinya penerapan Perda tersebut. Oleh sebab itu, maka demi memaksimalkan penerapannya, diperlukan pengkajian ulang, khususnya pada bagian sanksi demi menanggulangi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung.

2. Bahasannya sesuai dengan bidang studi yang ditekuni untuk menanbah wawasan keilmuan bagi penulis pada umumnya, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karna banyak literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
3. Sebagai tugas pelaksanaan ini yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Selain itu penelitian proposal yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok” belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi, khususnya di Jurusan HukumTata Negara (Siyasah Syar'iyah).

### **C. Latar Belakang Masalah**

Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang tidak sehat akan tetapi merokok dikalangan masyarakat adalah sebuah hal yang sudah biasa, masyarakat menganggap merokok sebuah prilaku yang bisa membuat dirinya tenang dikarenakan rokok mengandung zat nikotin yang bisa menimbulkan efek sulit ditinggalkan / kecanduan. Namun dalam ilmu kesehatan merokok tidak baik bagi kesehatan, kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia. Pembangunan nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan.

Bahaya merokok adalah dapat menyebabkan penyakit kanker paru-paru, jantung, stroke, diabetes dan lainnya. Kandungan partikel karsinogenik yang terdapat dalam rokok dapat meningkatkan resiko terkena penyakit kanker dan paru-paru. Mengingat bahayanya yang ditimbulkan oleh rokok, maka kerjasama antara pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh.<sup>6</sup>

Upaya besar bangsa Indonesia dalam meluruskan kembali kearah pembangunan nasional yang telah dilakukan menuntut reformasi total kebijakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan pada hakikat nya adalah perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang ingin dicapai.<sup>7</sup> Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui tercipta nya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduk nya hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat.<sup>8</sup>

Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Bandar Lampung merupakan amanah Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Amanah Undang –undang Nomor 36 tahun 2009 yang mewajibkan tiap daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok disambut baik oleh

---

<sup>6</sup> SOEPRA *Jurnal Hukum Kesehatan*, vol. 2 No. 1 Th.2016, h. 15.

<sup>7</sup> Depatemen Kesehatan Republik Indonesia, *Riset Kesehatan Dasar* (Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementerian RI, 2013), H. 67.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 69.

beberapa daerah di Indonesia termasuk salah satu nya adalah provinsi lampung dengan menyusun Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya masing-masing.

Daerah-daerah tersebut adalah Kota Bandar Lampung, yang menerapkan PERDA tentang Kawasan Tanpa Rokok. Institusi yang telah menerapkan kawasan tanpa rokok umumnya adalah institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan puskesmas, Institusi pendidikan, serta perusahaan swasta. Disusunnya kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok.<sup>9</sup>

Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun di lain pihak ada kelompok masyarakat yang diancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan, karena ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Apalagi beberapa waktu lalu salah satu ormas Islam mengharamkan produk rokok.

Rokok Dalam Peraturan Daerah ini tidak melarang orang untuk merokok hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok sembarangan tempat, dikarenakan akan terjadinya kerugian bagi masyarakat yang tidak merokok yang menghisap asap dari rokok tersebut dan akan memberi dampak buruk bagi anak-anak yang melihat masyarakat yang merokok dan juga akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya, hanya saja para

---

<sup>9</sup>Tobacco, *Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Control Support Center, 2010), h.58

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat namun juga harus memperhatikan kesejareraan para pekerja pabrik rokok. Oleh karena itu pemerintah membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Kawasan Tanpa perokok tersebut masih banyak yang tidak peduli dan tidak tahu dengan Peranturan tersebut.

Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah di dentifikasi sebagai strategi intervensi utama pengendalian penyakit tidak menular. Kawasan tanpa rokok adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, promosi, dan atau mempromosikan produk tembakau. Ada beberapa lokasi di Bandar Lampung yang melarang untuk merokok atau disebut dengan kawasan tanpa rokok yaitu seperti tempat pendidikan, lingkungan kesehatan, perkantoran, tempat bermain anak dll.

Menurut Islam merokok tidak diperboleh kan sebagaimana bersabda:

وَلَا تُنْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*Artinya: Dan janganlah jatuhkan dirimu dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).<sup>10</sup>*

Oleh karena itulah para ilmuwan dan para ulama mengharamkan rokok. Yaitu karena di dalamnya terdapat bahaya yang besar, yang ini

---

<sup>10</sup> Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 491.



diketahui sendiri oleh para perokok. Serta diketahui oleh para ahli kesehatan dan juga diketahui oleh setiap orang yang bergaul dengan para perokok.

Terkadang rokok itu juga menyebabkan kematian mendadak dan penyakit lainnya, menyebabkan batuk, menyebabkan penyakit yang permanen, semua itu telah kita ketahui bersama. Dan kita telah ketahui bersama berbagai kabar yang banyak akan fakta ini mengenai para perokok atau penghisap sisha dan jenis-jenis rokok yang semisalnya. Semuanya berbahaya, wajib untuk melarangnya dan wajib bagi para ahli kesehatan untuk menasehati para perokok, dan wajib pula bagi para dokter dan para guru untuk meninggalkan rokok, karena para dokter dan guru biasanya menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Bandar Lampung. Oleh karna itu, judul yang diambil penulis adalah :**Impelentasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Perspektif Hukum Islam** (Studi Kota Bandar Lampung)

#### **D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah**

1. Fokus penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung.
2. Batasan penelitian ini adalah hanya membatasi sesuai dengan judul yang akan penulis teliti yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap PERDA Kota Bandar Lampung No.5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ?
2. Bagaimana Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung ?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akademisi khususnya hukum yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Dan diharapkan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada

umumnya dan hukum pidana pada khususnya di Universitas Islam Negeri Lampung

**b. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis ialah sebagai salah satu syarat untuk terpenuhinya dalam menyelesaikan studi di Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**G. Metode Penelitian**

Dalam mencapai tujuan penelitian dengan tetap mengacu kepada standar ilmiah sebuah karya penelitian, untuk itu penulis menggunakan metode yang ada sebagai acuan dalam suatu penelitian.<sup>11</sup> Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif, karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengelola datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Jenis dan Sifat Penelitian**

**a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian

---

<sup>11</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.15.

lapangan (*field research*), yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini.<sup>13</sup>

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Metode deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teoribukan untuk menguji teori metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah, peneliti bertindak sebagai pengamat.

## 2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di

---

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

<sup>13</sup>Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.36.



bahas.<sup>14</sup>Sumber data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara langsung dari petugas Dinas Kesehatan, tempat pendidikan dan masyarakat yang merokok.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh sebagai pelengkap dari primer.Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan sebagainya.<sup>15</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>16</sup> Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subyek atau obyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 70 (tujuh puluh) pegawai.

---

<sup>14</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006),h.30.

<sup>15</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset,1983),h.86.

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif* Cetakan ke20, (Bandung: alfabeta Cv,2014), h.80.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau obyek yang mewakili populasi.<sup>17</sup> Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Sampel yang terdiri dari 6 orang karyawan yang terdiri dari Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung, Sekertaris Satpol PP Kota Bandar Lampung, Kabid PERDA, Kabag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Program dan Informasi Satpol PP Kota Bandar Lampung, dan Kasi Pengamanan.

**4. Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu dengan menyiapkan beberapa

---

<sup>17</sup> Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014) h.33.

<sup>18</sup> Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Surakarta : UNS, 2006), h.72.

pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan, dan yang berkaitan dengan permasalahan.

Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau keterangan dari Dinas Kesehatan, pengelola rumah sakit dan tempat pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 menjadi objek penelitian. metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas (tidak berstruktur), sehingga responden secara spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian bisa diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah Implementasi tentang kawasan tanpa rokok.

#### b. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian.

Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang relevan dengan data-data yang dibutuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana

Implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ditempat-tempat tertentu, seperti tempat umum, perkantoran, perusahaan dan kendaraan umum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data, mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini dilakukan di kantor-kantor kesehatan tertentu yang menjadi lokasi penelitian.

## 5. Pengolahan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian dapat diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengoreksi data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.
- b. Rekontruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*)

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir deduktif adalah metode Analisa data dengan cara bermula dari data yang



bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Hukum Islam, Prinsip dan Kaidah-Kaidah

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Istilah Hukum Islam adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam. Secara umum dalam ungkapan keseharian sering juga dinyatakan dengan sebutan *شريعة* (*syari'ah*) atau *شرع* (*syara'*).

Adapun lafaz *شريعة* (*Syari'ah*) atau *شرع* (*syara'*) itu sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab (عشر - عاشر و شريعة يشرع -) yang berarti *طريقة* atau *سنة* / *sunnah*<sup>19</sup> (سنن - يسن - سنة) atau dalam bahasa Indonesia berarti *jalan*<sup>20</sup>.

Sedangkan untuk pengertian lafaz *شريعة* (*Syari'ah*) secara istilah terdapat dua batasan definisi yang saling menguatkan satu sama lainnya, yaitu batasan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah:

- 1) Menurut Ibnu Taimiyyah (w. 728 H.), *شريعة* (*Syari'ah*) berarti ketetapan hukum yang disyare'atkan Allah berupa jalan yang harus

---

<sup>19</sup> Abu Lowis Ma'ruf, *Al-Munjid*, (Bairut: Daar al-Masyreq, 1973), h. 382.

<sup>20</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syare'at Islam Menurut Ajaran Ablus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 13.

dilalui oleh hamba-Nya.<sup>21</sup> Dengan demikian menurut Ibnu Taimiyah Syari'ah itu merupakan sejumlah ketetapan hukum yang baik secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit) bersumber dari Allah yang harus diikuti.

- 2) Secara istilah hukum, *شرعية* (*Syari'ah*) berarti apa-apa yang ditetapkan Allah bagi hamba-hamba-Nya berupa ketentuan-ketentuan hukum.<sup>22</sup> Definisi kedua ini ternyata menguatkan pengertian definisi yang pertama, yaitu memberikan penekanan bahwa *شرعية* (*Syari'ah*) itu bersumber dari Allah untuk diikuti dan ditaati oleh umat manusia. Masing-masing kedua batasan Syari'ah tersebut menyebutkan istilah *ketetapan hukum* yang bersumber dari Allah Yang Maha Tinggi. Menurut Ahmad Hasan, yaitu seseorang intelektual muslim Pakistan dalam karya monumentalnya yang berjudul *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, ditegaskan bahwa Syari'ah itu adalah istilah yang digunakan dalam bahasa hukum sebagai jalan kesalehan yang dikaruniakan dari langit (istilah “langit” difahami Yang Maha Tinggi)<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat ditegaskan di sini bahwa *Syari'ah* itu berarti segala ketentuan Allah mengenai segala perbuatan hamba yang harus dijalani, diikuti, dipatuhi dan ditaati serta mempunyai sanksi hukum bagi siapa saja yang menyalahinya.

---

<sup>21</sup> Ibnu Taimiyah, *Syarbu Kitab al-Siyasati al-Syar'iyah*, (Kairo: Mu'assanah al-Mukhtar, 1424 H/2007 M), h. 5.

<sup>22</sup> Abu Lowis Ma'luf, *Op. Cit.*

<sup>23</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Terjemahan oleh Agah Garnadi dari “*The Early Development of Islamic Jurisprudence*”, Islamic Research Institute Pakistan, Islamabad, 1970), Penerbit PUSTAKA ITB, 1405 H / 1984 M., h.9.

Istilah Syari'ah adalah suatu istilah mengenai hukum yang bersumber pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan melalui wahyu Allah SWT yang membuat hukum. Dengan demikian Hukum Islam itu adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit).

## **2. Sumber Hukum Islam**

Uraian mengenai pengertian Hukum Islam terdahulu pada hekekatnya sudah memberikan arahan yang cukup jelas mengenai Sumber Hukum Islam.<sup>24</sup> Namun karna masih ada kerancuan mengenai apa yang disebut Sumber Hukum Islam dan Dalil Hukum dalam Islam, agar lebih memperjelas perbedaan antara sumber dan dalil dalam Hukum Islam.

Sumber hukum dimaksudkan di sini adalah sesuatu tempat awal dari mana atau di mana didapatkan ketentuan atau ketetapan hukum itu sendiri berasal. Untuk mengenal dan mengetahui apa yang menjadi sumber hukum dalam Islam hanya dapat ditemukan jawabannya melalui petunjuk dan sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW.

Berdasarkan pada nash al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajara Islam terdapat beberapa petunjuk mengenai Sumber Hukum Islam.

Diantaranya dalam Q.S An-Nisa ayat 59 adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam Cet. 1.*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.25.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Q.S An-Nisa:59)<sup>25</sup>

Pada ayat ini terdapat kesepakatan pendapat para ulama tafsir bahwa perintah mentaati Allah dan Rosul-Nya merupakan kewajiban mengikuti Al-Qu'an dan Sunnah. Sedangkan perintah mentaati *Ulil Amri* (pemerintah penguasa) merupakan kewajiban mengikuti kesepakatan lembaga hukum pemerintahan *Ijma'*, sedangkan perintah mengembalikan masalah kepada Allah dan Rosul-Nya juga merupakan perintah wajib mengembalikan atau menyandarkannya kepada makna atau cakupan nilai Al-Qur'an dan Sunnah melalui praktek *Ijtihad'* dengan menerapkan teori *Qiyas* sebagai sumber rasio. Dengan demikian sumber hukum Islam terdiri dari sumber wahyu dan sumber rasio.

عَلَىٰ صَدْرِهِ وَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لِمَا يَرِىْ صَیْ  
 رَسُوْلُ اللّٰهِ.

Artinya:”Akan aku tetapkan kitabullah, bila belum aku dapatkan maka akan aku tetapkan dengan sunnah rasu-Nya, bila masih belum juga aku dapatkan aku akan berijtihad dengan analisa akalku dan aku tidak akan berlebihan“. Maka serta merta Rosullulah menepuk, dadanya, seraya

<sup>25</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung:Diponegoro,2008),h.491.

*mengatakan: “Serta puji bagi Allah yang telah menetapkan utusan rosul-Nya dengan orang yang diridhoi rosul-Nya.*

Pada hadist dialogis yang diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal tersebut menggambarkan penegasan mengenai restu Rosullulah SAW akan sumber rujukan hukum yang direncanakan Mu'az bin Jabal manakala ia akan mengambil keputusan hukum di Yaman kelak, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad (rasio) dengan prioritas secara urut dan tertib.

Merujuk pada kedua nash maka disepakati di kalangan ulama bahwa Sumber Hukum Islam itu terbagi 2 macam sumber , yaitu Wahyu dan Akal sebagaimana dalam uraian berikut :

#### 1) Wahyu (Naql)

Sumber wahyu adalah sumber hukum yang berupa wahyu, baik itu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rosulullah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril maupun wahyu yang langsung difahami oleh Rosullulah dalam bentuk Sunnah.

Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan sebutan Al-Qur'an itu adalah firman Allah SWT berupa wahyu yang diturunkan kepada rosullulah Muhammad SAW dalam ungkapan bahasa Arab dan disampaikan kepada seluruh umatnya secara mutawatir dalam bentuk mushhalaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas sebagai penjelasan menyangkut kemaslahatan

hidup manusia, baik kemaslahatan mereka di dunia ini ataupun diakhirat kelak.<sup>26</sup>

Demikian juga halnya dengan Sunnah, secara bahasa juga berasal dari lafaz Arab yaitu سُنَّ يَسُنُّ سُنَّةً yang artinya الطَّرِيقَةُ (*jalan/cara*).<sup>27</sup> Sedangkan secara istilah syara' yang dimaksudkan dengan Sunnah itu adalah apa saja muncul dari Rosulullah Muhammad SAW baik berupa perkataan atau perbuatan maupun ketetapan.<sup>28</sup>

## 2) Rasio (Akal)

Adapun Rasio (Akal) adalah proses kerja ratio atau akal manusia yang mampu memahami dan menganalisa tekstual wahyu dan realita fenomenal. Sumber ratio dalam ungkapan bahasa hukum dalam Islam sering juga disebut 'Aql. Sehingga disepakati Sumber Rasio ('Aql) sebagai Sumber Hukum dalam Islam ini terdiri dari Ijma' dan Ijtihad' dengan uraian masing-masing sebagai berikut.

a. Ijma' secara bahasa mengandung dua pengertian sebagai berikut:

1) Yaitu niat dan kehendak, untuk sesuatu. Sebagai contoh apabila dinyatakan "si Fulan berijma' atas itu", apabila ia berniat untuk itu.

Pengertian seperti ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Yunus ayat 71 adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Zaiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ta'alif, 1964/1965)., h.32.

<sup>27</sup> Madzkur, Muhammad Salam, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, (Kuwaet: Al-Ashriyyah, 1974)., h.35.

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwaet: Al-Qalam, 1977 M / 1397H), h. 26.

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ

*Artinya: karena itu bulatkanlah keputusanmu maksudnya sengajalah kalian untuk nya.*

Juga dalam sabda Rosullulah SAW :

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ أَصِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ

*Artinya: tidak sah puasa bagi orang yang belum menjama puasa sejak malamnya.*<sup>29</sup>

Berdasarkan hadist ini maka tidak salah untuk mengartikan lafaz Ijma' dengan arti "niat yang bulat".

- 2) Kesepakatan terhadap suatu hal. Dikatakan : "Suatu kaum Ijma'nya begini", apabila mereka sepakat hal yang demikian itu. Berdasarkan ini maka kesepakatan setiap kelompok atas satu dari sejumlah perkara, baik menyangkut urusan dunia maupun agama disebut "*ijma*".<sup>30</sup>

Perbedaan antara dua pengertian itu, bahwa Ijma' dalam pengertian pertama terwujud dan satu orang sebagai mana telah kita sebutkan, sedangkan Ijma dalam pengertian kedua tidak dapat terwujud kecuali dari dua orang atau lebih.

---

<sup>29</sup> Hadist yang ditakhrijkan oleh Al-Daruquthni, Juz 2, h.173.

<sup>30</sup>Dr. Bunyana Solihin,M.Ag, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018),h.15.

ا تنفا Beranjak dari batasan Ijma' tersebut yang menyebutkan

ق المحتدين , maka dapat difahami bahwa *Ijma'* itu harus

dilakukan oleh sejumlah mustahid. Belum dapat dikatakan

*Ijma'* apabila pelakunya hanya seorang mujtahid. Inilah yang

dimaksud dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id Ibn al-

Musaiyab dari Ali R.A.berikut:

عن على رضي الله عنه انه قال , قلت: يا رسول الله , أ

لأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك

السنة؟ قال: إجماعوا له الخالمين من المؤه شوري بينكم, ولا

تقضوا فيه برأي واحد.(ح.ر. سعيد بن المسيب)

*Artinya: Dari Ali R.A. ia berkata : Ya Rosullulah , muncul pada kami perkara yang belum ada ayat Al-Qur'an turun mengenai perkara itu dan belum juga pernah ada Sunnah dari engkau?. Rosul bersabda: Untuk itu kumpulkanlah para ilmuwan yang beriman, adakan musyawarah sesama kalian, dan jangan sekali-kali kamu tetapkan putusan untuk itu berdasarkan pendapat seseorang. (H.R. Sa'id ibnu Musaiyab).*

Dalam hal ini Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-

Juwaini (w. 478 H.) yang lebih dikenal dengan panggilan Al-

Juwaini yang tidak jarang dipanggil Imam Al-Haramain,

dalam hal ij'ma ia masih mensyaratkan bahwa batasan

minimal jumlah para mustahid itu harus mencapai kriteria

jumlah mutawatir dan harus disepakati oleh seluruh para



mustahid yang hadir. Menurut Imam Al-Haramain bahwa Ijma itu belum terjadi apabila masih terdapat pendapat yang disepakati mujtahid lainnya.

Lain halnya dengan Ibnu Jarir, Abu Bakar al-Razi dan Abu al-Husein al-Khaiyath dari kalangan ulama Mi'tazilah, menurut mereka bahwa kesepakatan jumlah para mustahid terbanyak sudah merupakan Ijma selama yang berpendapat lain tidak mencapai jumlah mutawatir.

Adapun ulama Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang mustahid mengemukakan ijtihadnya sedangkan selainya yang lebih banyak jumlahnya diam tidak memberikan sanggahan, menurut pandangan ulama Hanafi dalam kondisi seperti itu sesungguhnya telah terjadi peristiwa *Ijma'* ulama. *Ijma'* model inilah yang mereka sebut dengan istilah Ijma' Sukuti.<sup>31</sup>

Ungkapan: *من أمة محمد صلى الله عليه وسلم* maksudnya adalah para mustahid di luar umat Muhammad SAW, misalnya mustahid Yahudi dan Nasrani adalah di luar dari yang dimaksudkan, karna mereka berakidah lain dan tidak menerima kebenaran Islam.

Demikian pula selanjutnya dalam definisi disebutkan tidak terikat oleh waktu dan tempat sejak wafatnya Rasul SAW

---

<sup>31</sup> Ali Hasbillah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Al-Ma'arif 1992 H), h.109.

hingga akhir zaman . Kemudian diakhiri dengan pernyataan ungkapan, menurut jumhur ulama dimaksudkan satu hukum tertentu untuk satu masalah tertentu dengan tidak keluar dari tuntutan syara’.

Demikian pengertian *Ijma’* menurut jumhur ahli ushul. *Ijma’* dalam pengertian dimaksud sangat dimungkinkan untuk diwujudkan sekalipun berbeda karakter budaya dan adat setiap umat. Namun demikian Ahmad bin Hambal dan Ibnu al-Qaiyim dalam riwayat yang terpisah dinyatakan bahwa sesungguhnya Ahmad bin Hambal menolak kemungkinan dapat terwujud-nya *Ijma’* yang dimaksudkan. Diriwayatkan bahwa Ahmad bin Hanbal mengatakan : “Siapa yang mengatakan telah terjadi *Ijma’* se-sungguhnya ia telah berbohong, perbedaan pasti ada, tapi tidak atau belum diketahui oleh para promotor *Ijma’*”.

Demikian pula secara terpisah diriwayatkan bahwa Ibnu al-Qaiyim pernah mengatakan: “Sesungguhnya tidak mungkin dapat mengetahui terjadinya ke-sepakatan seluruh ulama umat yang ada di barat dan di timur.”<sup>32</sup>

#### b. Ijtihad

Menurut bahasa, kata” Ijtihad” yang mengikuti wazan “*ifti’al*”, asal mula dari kata “*jahd*”, yang berarti “*taqah*” (kemampuan atau kekuatan). Dengan mengacu kepada hadist

---

<sup>32</sup> Ibid., h.111-112.

*Mu'az*, maka kalimat “*Ijtahada Ra'yu-Ijtihad*” mempunyai arti mencurahkan kemampuan untuk mengambil hukum dari suatu dalil.<sup>33</sup>

Menurut al-Ghazali adalah *ijtihad* hanya dapat dipakai dalam konteks perbuatan yang di dalamnya mengandung kesulitan dan hal yang berat. Karna itu dapat dibenarkan bila dikatakan “*ijtahada fi haml hajar al-raha* ” (seseorang berusaha keras untuk membawa batu penggiling), namun tidak bisa dibenarkan bila dikatakan “*ijtahada fi hami khardalah*” (seseorang berusaha keras membawa biji-bijian).

Senada dengan pendapat al-Ghazali bahwa kata *ijtihad* hanya dapat dihubungkan dengan sesuatu yang berat, sehingga dikatakan “*istafragha wus'ahu fi haml al-saqi* ” (seseorang berdaya upaya untuk membawa sesuatu yang berat), dan tidak benar bila dikatakan. “*istafragha wus'ahu fi haml al-nawah* ” (seseorang berdaya upaya untuk membawa biji-bijian).<sup>34</sup>

*Ijtihad* ( استخراج الحكم من المسألة ) – mengeluarkan hukum dari masalah), yaitu model kerja penelitian berupa upaya menggali, mengetahui dan memastikan hukum sesuatu yang tidak tenaskan sesuai dengan yang dihendaki oleh Allah melalui analisa logika. Dan definisi Ijtihad selengkapny adalah:

---

<sup>33</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif),h. 218.

<sup>34</sup> Ilyus Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h 176-177.

*Ijtihad* adalah penggalan hukum masalah berlandaskan Dalil Aqli dengan segala cakupannya. Dapat juga ditegaskan bahwa Ijtihad itu merupakan jenis Penelitian Hukum Empiris yang orientasi kerja penelitiannya adalah pada kasus yang tidak didapatkan nash hukum yang *qath'i* dari sumbernya yang primer, Al-Qur'an dan Sunnah.

Secara teknis *ijtihad* merupakan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sebuah masalah ketika al-Qur'an dan Sunnah diam tidak memberikan jawaban, konsep Ijma' muncul sebagai hasil upaya percobaan Ijtihad. Dengan kata lain *ijtihad* adalah penggerahan segala kesanggupan seorang fiqih untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu hukum melalui dalil syara'.<sup>35</sup>

Namun pada perkembangan selanjutnya, diputuskan bahwa Ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Tujuan *ijtihad* adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah SWT di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Orang yang melakukan Ijtihad disebut mujtahid.

Berkenaan dengan pembatas pengertian dan cakupan *ijtihad*, terjadi pengkajian tentang kawasan *ijtihad* (*majal al-ijtihad*), syarat mustahid, dan peringkat (*thabaqat*) mustahid dengan berapa pandangan. Namun demikian, jarang bahkan langka

---

<sup>35</sup> Abdullah Ahmed An-Naim, *Op. Cit.*, 45.

pengkajian tentang jenjang ijtihad berkenaan dengan cakupan dan berbagai dimensi hukum Islam, posisi mujtahid dalam struktur masyarakat, strategi dan tahapan *ijtihad* serta daya ikat dan daya atur produk ijtihad bagi masyarakat.<sup>36</sup>

Pengkajian pata dataran dewasa ini sangat diperlukan, oleh karna itu muncul berbagai ijtihad kolektif, baik yang dilakukan oleh dan dalam lingkungan sesuatu *jam'iyah* maupun yang “diharapkan” berlaku bagi seluruh atau sebagian ummat dalam suatu masyarakat bangsa. Kebutuhan terakhir muncul oleh karna di satu pihak pluralitas suatu masyarakat semakin mengikat, namun di pihak lain, hubungan antar manusia mengalami globalisasi, sehingga persamaan kepentingan dan aspirasi semakin besar.

### 3. Prinsip Hukum Islam

Kata prinsip secara etimologi adalah dasar , permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip ialah tempat permulaan, titik tolak, atau *al-mabda* . Secara terminologi, hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaanyadan membentuk hukum dalam setiap cabang- cabangnya.<sup>37</sup> Prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yag bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Adapun Abu Zahrah mengemukakan

---

<sup>36</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)., h.175.

<sup>37</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM, 1995)., h. 69.



pandangan, bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* yang baik berupa *iqtida* (tuntutan perintah atau larangan), *takhyir* (pilihan) maupun berupa *wadh'i* (sebab akibat). Ketetapan Allah ,dimaksudkan pada sifat yang telah diberikan oleh Allah SWT terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.<sup>38</sup>

Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan, ada tujuh prinsip umum hukum Islam yaitu: prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, prinsip ta'awun dan prinsip toleransi. Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan kalimat *La Ilaha Illa Allah* ( Tidak ada tuhan selain Allah ). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Prinsip ini dipahami dari firman Allah *QS. Ali Imran Ayat 64*:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ  
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

---

<sup>38</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)., h. 26.

بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

*Artinya: Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)"<sup>39</sup>.*

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi penuhanan antara sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaaan manusia.

Ini tercermin dari firman Allah dalam Q.S Adz-Dzariyaat ayat 56 adalah sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*

---

<sup>39</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op.cit,h.592

Prinsip tauhid ini juga menghendaki dari memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah (Al-Qur'an dan Sunnah). Dari prinsip umum tauhid ini lahir prinsip-prinsip khusus dalam bidang ibadah, yaitu:

- a) Prinsip pertama. Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara – Artinya bahwa tak seseorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib di sembah. Nabi dan Rosulpun hanya sebatas penyampai pesan-pesan dari Allah semata. Intinya adalah yang berhak disembah adalah hanya Allah SWT. Prinsip ini menegaskan bahwa tak ada perantara antara hamba dengan tuhanya seperti yang terdapat dalam agama lain.
- b) Prinsip beban hukum (*taklif*) ditujukan untuk memelihara kaidah dan iman, penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Berdasarkan prinsip tauhid dan prinsip-prinsip yang mendukungnya maka lahirnya asas hukum seperti asas kemudahan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan, menjauhi kesulitan sehingga semua hukum Islam dapat dikerjakan oleh manusia.<sup>40</sup>

Dalam hukum Islam dikenal beberapa bentuk keringanan hukum seperti, *rukhsah* dan *dharurah*. Rukhsah adalah keringanan dalam melaksanakan sesuatu yang sebelumnya terlarang, seperti ibadah

---

<sup>40</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997),h. 66.

menjamak, memendekan sholat dan dalam rangka menghindari kesukaran (masyaqqah). Sedangkan Dharurah adalah keadaan kritis atau serius yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar terhindar dari kerusakan yang fatal atau kebinasaan.<sup>41</sup>

Dari azas hukum tersebut dirumuskan kaidah-kaidah hukum dalam aspek ibadah ialah menyembah dan mengikuti teks. Menyembah semata-mata karna Allah SWT meskipun terkadang tidak sejalan dengan logika. Menurut As-Syatibi, secara umum ibadah adalah melaksanakan perintah Allah SWT, mengaggungkan dan menghadap hanya kepada-Nya.<sup>42</sup>

- b. Prinsip Keadilan ialah berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Akan tetapi keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut Wahbah Al-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karna esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagian jalan untuk memperluas perilaku dan cara

---

<sup>41</sup> Qutub Musthafa Sanu, Mu'jam Musthalahat, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dar al-Fikr al-Mu'ashir 2000), h. 217-265

<sup>42</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, ter: Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 217.

pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

Penggunaan tempat “adil/keadilan” dalam al-Qur’an di antaranya: Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran dalam bersaksi. Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah atau berdagang dan keadilan sesama muslim yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam (*murunah*) dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan, yaitu perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas, apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.

- c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar ialah hukum Islam digerakan dalam merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai *social engineering* atau rekayasa sosial, teori ini disebut oleh Rescoe Pound sebagai *a tool of engineering*, ini



merupakan bentuk rekayasa hukum dalam masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat dari perilaku yang negatif menjadi perilaku yang positif. Sebagai contoh bahwa sebelum Nabi Hijrah ke Madinah penduduk yang mendiami kota Madinah selalu berperang (suku Aus dan Khazraj). Namun sesudah Nabi Hijrah ke Madinah, penduduk Madinah tidak lagi ditemukan berperang karna tunduk dan patuh terhadap kepada kepemimpinan Muhammad SAW yang mengayomi seluruh penduduk Madinah. Melihat hal ini tampak bahwa hukum dijadikan sebagai acuan oleh penduduk Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad yang kondisi masyarakat kota Madinah saat itu dan mereka bersatu di bawah payung hukum.<sup>43</sup> Menurut Hasbi Ash Shidieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Perkategori Aman Makruf Nahi Mugkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi.

Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Sumber Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),. h.38

kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain-lain. Di sinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut surat *Al-Baqarah*, ayat 256 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى  
لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT.<sup>44</sup>

Prinsip Persamaan atau Egalite. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al-Shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam meggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum

---

<sup>44</sup> Ahamd Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXV, CeT ke-1, (Semarang :Toha Putra, 1989), h. 148.

Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia.

Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diberlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang dizhalimi dan diuntungkan dengan alasan apapun. Rosul dengan tegas menyatakan “tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya”. Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut *equality before the law*’ sejak empat belasan abad yang lalu jauh sebelum hukum modern.<sup>45</sup> Garansi egalite dalam al-Qur’an terdapat dalam *Q.S Al-Hujarat ayat 13*:



يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.*<sup>46</sup>

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

---

<sup>45</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)., h. 18.

<sup>46</sup> Q.S Al- Al-Hujarat: 13

- d. Prinsip *al-Ta'awun* ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh umat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya. Allah berfirman dalam *Q.S al-Mujadilah ayat 9* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَمَعْصِيَةِ الرُّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ  
تُحْشَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.<sup>47</sup>

- e. Prinsip toleransi yang dihendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Menurut Umar Hasyim, prinsip toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama manusia atau kepada

---

<sup>47</sup> Al-Ibnu Hajar Al-Asqalami, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.232.

masyarakat sekitar untuk menjalankan keyakinan atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian masyarakat.<sup>48</sup> Namun menurut W.J.S. Poerwadarminto dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.<sup>49</sup> Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya persoalan ibadah saja tetapi mencakup ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. *Tasamuh* atau toleransi dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai. *Tasamuh* yang dimaksud adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama umat.

Peringatan Allah SWT berkaitan dengan toleransi dinyatakan dalam *Q.S Al-Mumtahanah ayat 8* sebagai berikut:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ

دِينَكُمْ أَنْ تَبْرَهُمْ وَتُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

---

<sup>48</sup> Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 22.

<sup>49</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h.184.



*Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.*<sup>50</sup>

Selain tujuh prinsip hukum di atas Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan dalam bukunya enam prinsip lain yang menyangkut hukum Islam ialah:

- a) Prinsip menghadapkan *khitab* kepada akal. Bahwa dalam hukum Islam akallah yang menjadi sebab dibebaninya kewajiban seseorang mukallaf. Oleh karenanya ilmu menjadi pokok dalam menambah cahaya akal. Islam merangsang manusia untuk mencari ilmu. Manusia mempunyai kemampuan akal yang baik dalam tataran akal praktis maupun akal murni. Akal murni terbentang luas, hanya Allah SWT yang tahu. Pada tataran inilah seyogyanya fuqaha senantiasa medasarkan pikirannya atas kebenaran wahyu, kemudian mereka menetapkan bahwa yang Maha pembuat hukum itu adalah Allah SWT.
- b) Prinsip memagari akidah dengan akhlak yang utama dapat menjaga kesucian jiwa dan meluruskan kepribadia seseorang. Prinsip ini berkaitan dengan kehormatan manusia seperti dinyatakan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadist. Kehormatan tersebut tidak hanya terbatas pada individu, ras, suku tertetu tetapi milik semua umat manusia.

---

<sup>50</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *bulughul*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 387.

- c) Prinsip menjadikan segala macam beban hukum untuk kebaikan jiwa dan kesucian, sekali-kali bukan untuk memberatkan badan.
- d) Prinsip mengawinkan agama dengan dunia masalah hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam yang di dalamnya terdapat berbagai bidang yang bertujuan meraih *muslahat* dan menolak *mafsadat*. Islam mengajak umatnya untuk melakukan integrasi antara pekerja dunia dengan akhirat. Menyerahkan masalah *ta'zir* (hukuman) kepada pertimbangan penguasa atau para hakim. Hukum Islam sudah menentukan batas-batas hukuman yang dijatuhkan atas pelaku tindak pidana, seperti pembunuhan dan pencurian. Bentuk hukuman ini sangat sedikit ketetapanannya jika dibandingkan dengan menetapkan hukum yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hukum atas pertimbangan inilah yang disebut dengan hukum *ta'zir*.<sup>51</sup> *Ta'zir* ialah jarimah yang diancam dengan hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Pemberian hukuman *ta'zir* untuk menghambat pelaku dari mengerjakan kejahatan sesudah dijatuhkannya hukuman.<sup>52</sup>
- e) Prinsip *Tahkim* ialah masalah-masalah hukum yang disengketakan oleh dua belah pihak dengan meminta seseorang hakim yang dipandang terhormat di kalangan mereka dan

---

<sup>51</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), h.6.

<sup>52</sup> Amrullah Ahad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.101.

keputusan-pun mengikat, tanpa adanya ketetapan atau legalitas atas hakim resmi.

Penjabaran prinsip atau karakteristik hukum Islam, pada dasarnya memiliki alur atau pikir dan pola logika hukum yang relatif searah, yaitu semua ketetapan hukum dalam Islam berorientasi pada pemurnian tauhid dan penyajian hukum sebagai sebuah instrumen agama dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia, dan di waktu yang bersamaan, model atau prinsip ini mendialogkan secara kritis bahwa perumusan hukum dalam syari'at Islam itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesukaran dan kesulitan (*musyaaqqah*).

f. Prinsip Maqasid Asy-Syariah

Prinsip maqasid asy-syariah ditinjau dari sudut bahasa merupakan kata majemuk yang terdiri dari 2 kata, yakni *Al-Maqasid* dan *Asy-Syariah* akar kata maasid bermakna menyengaja dimaksud kepada jamak yang bermaksud kesengajaan atau bertujuan.<sup>53</sup> Sedangkan Syariah dalam bahasa Arab berarti jalan menuju air.<sup>54</sup> Teori *Maqasid Asy-Syariah* pada dasarnya sudar pernah introdusir oleh para cendikiawan muslim sebelum Imam Syatibi, namun beliau kemudian mampu”mengkomunikasikan” teori tersebut dalam bentuk sehingga ia

---

<sup>53</sup> Mahmud Yunus, *Qamus 'arabi-indonisy*, (Jakarta: Hida Karya Agung , 1990), h.343-344

<sup>54</sup> Muhammad Ibn Mukhrim Ibn Manzur Al-Misry, *Lisan Al-Arab* (Bairud As-Sadir, 1998),h.177

dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu maqasid asy-syariah hingga dijuluki dengan bapak *Maqasid Asy-Syariah* dengan bukunya yang terkenal *Al-Muwafaqat*.

#### 4. Kaidah-kaidah Hukum Islam

Kaidah hukum Islam atau sering juga disebut kaidah hukum dalam Islam merupakan suatu istilah atau sebutan bahasa hukum dalam Islam sebagai terjemahan dari istilah القاعدة الشرعية (*kaidah syar'iyah*). Untuk memperjelas apa yang dimaksudkan dengan istilah atau sebutan bahasa hukum dalam Islam dimaksud, berikut ini perlu disajikan terlebih dahulu uraian secukupnya mengenai pengertian القاعدة الشرعية (*kaidah syar'iyah*), lingkup cakupan dan sejarah kemunculan serta perkembangannya sebagai cabang ilmu dalam perjalanan sejarah hukum Islam.

Kaidah hukum Islam secara bahasa adalah bentuk dalam bahasa Arab yang bentuk lafaz jamaknya adalah *al-Qawa'id*, yang berarti landasan, dasar atau fondasi suatu bangunan. Arti lafaz *al-Qawaid* secara bahasa ini sesuai dengan firman Allah SWT yang diungkap dalam dua ayat al-Qur'an dalam *Q.S Al-Baqarah ayat 127* dan *Q.S An-Nahl ayat 26* adalah sebagai berikut yaitu:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S Al-Baqarah: 127)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ

عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah Mengadakan makar, Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. (Q.S. An-Nahl: 26)

Memperhatikan kedua firman Allah tersebut, maka lafaz *al-Qawa'id* dalam kedua ayat tersebut menunjukkan arti yang sama yaitu suatu landasan dasar atau fondasi yang didirikan di atasnya suatu bangunan.<sup>55</sup> Di samping itu secara bahasa lafaz Kaidah (القاعدة) juga merupakan bentuk jamak dari lafaz Kaidah (قَاعِدَة) yang berarti wanita lanjut usia (bungkuk) yang telah monopouse,<sup>56</sup> sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 60 yaitu:

مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ

ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

<sup>55</sup> Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1414 H / 1994 M). h. 39.

<sup>56</sup> 'Ulwan, Isma'il bin Hasan bin Muhammad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Khams al-Kubra*, (Yogyakarta: Dar Ibn al-jauzi, 1429 H), h.19.

*Artinya: dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.*

Menurut para ahli bahasa, lafaz القاعدة (*al-kaidah*) berarti juga

الضابطة (*al dhabithah*) yaitu suatu ketentuan yang mengikat dan

mencangkup serta berlaku bagi seluruh bagian-bagiannya, misalnya:<sup>57</sup>

الفاعل مرفوع (*al-Fa'il itu marfu'*), berdasarkan kaidah ini berarti seluruh lafaz

dalam betuk فاعل (*subjek*) itu harus مرفوع yaitu berharakat dhammah (ُ)

Adapun pengertian secara istilah menurut Abu al-Baqa' al-Kafali al-kaidah berarti sesuatu ketetapan secara pasti diyakini mencangkup seluruh ketentuan yang berlaku bagi masing-masing objeknya.<sup>58</sup>

Menurut Ahmad H.A. Jazuli kaidah hukum Islam merupakan kesimpulan umum dari aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam, yang kemudian diuji, dikritik dan diskusikan di kalangan para ahli hukum Islam sepanjang perjalanan sejarahnya serta diukur akurasinya oleh ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi kemudian ditetapkan sebagai kaidah hukum yang sudah mapan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Al-Zarqa', Muhammad bin Muhammad, *Syarbu al-Qawa'id al-Fiqbiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1409 H / 1989 M), h.33

<sup>58</sup> Dr Bunyana Shoihin, M.Ag, *Op.Cit*, h.47

<sup>59</sup> Jazuli H.A., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Press, 2002), h. 110-123.



Dalam kajian hukum Islam tidak terlepas dari kajian ilmu Ushul Fiqh dan ilmu Fiqh. Sedangkan Ilmu Ushul Fiqh adalah disiplin ilmu tersendiri yang objek kajiannya terpisah dari ilmu Fiqh. Demikian sebaliknya Ilmu Fiqh adalah disiplin ilmu tersendiri yang objek kajiannya juga terpisah dari Ilmu Ushul Fiqh. Masing-masing dari kedua ilmu tersebut memiliki kaidah keilmuan tersendiri sebagaimana juga disiplin ilmu lainnya.

Adapun kaidah Qawaid Fiqhiyyah yang melarang tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafadz sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah antara lain :

*لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَر*  
*Artinya: tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.*

Dari kaidah yang dikemukakan diatas menunjukan bahwa kaidah fiqhiyyah disusun dari kandungan atau nilai-nilai yang ada didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu Ali Ahmad Al-Nadawi mengatakan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber pengambilan kaidah fiqhiyyah. Karena bersumber dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah itulah kaidah fiqhiyyah mampu sebagai metode penerapan hukum dan hujjah fiqhiyyah.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ali Ahmad Al-Nadawi, *Al-Qawaid Fiqhiyyah* (Jakarta: Aglo Media, 2004),h.253.

## B. Rokok dan Bahayanya

### 1. Pengertian Rokok

Merokok pada hakikatnya adalah meghisap gabungan pengaruh yang merugikan dari nikotin, karbon monoksida, tar dan racun lainnya. Nikotin menyebabkan jantung bekerja lebih berat dan membutuhkan lebih banyak oksigen, tetapi karbon monoksida mengurangi pengambilan oksigen oleh darah. Sedangkan tar lebih memberat keadaan yang mengurangi kemampuan penyimpanan udara oleh paru-paru. Semakin banyak merokok juga dapat menyebabkan penyakit jantung kebiasaan merokok juga dapat menimbulkan jenis penyakit yang berbahaya lainnya diantaranya kanker paru-paru, impotensi, dll. Bahkan para ahli dari WHO menyatakan bahwa dinegara dengan kebiasaan merokok yang telah meluas.<sup>61</sup>

Rokok merupakan suatu benda yang tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat saat ini dan sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari rokok berbentuk silinder dengan dua warna, yakni putih dan coklat dengan ukuran 70-120mm ini sudah terkenal dimana-mana.<sup>62</sup>

Menurut Tarwoto dkk faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan merokok adalah tekanan teman sebaya, berteman dengan perokok usia muda, status sosial ekonomi rendah, mempunyai orang tua yang merokok, saudara kandung, lingkungan sekolah (guru), yang merokok dan tidak percaya bahwa rokok mengganggu kesehatan.

---

<sup>61</sup> Drs. Ahsin W.Alhafidz, M.A., *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), h.225.

<sup>62</sup> Bustan M.N., *Epidemiologi Penyakit tidak Menular*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1997)., h. 76.

Dalam realitanya rokok adalah salah satu aset negara yang cukup besar bagi bangsa Indonesia, tidak terhitung beberapa banyak sumbangan *financial* yang masuk ke kas negara dari bisnis yang satu ini.<sup>63</sup> Jadi selain berbahaya bagi kesehatan rokok juga menjadi satu alternatif untuk kesejahteraan masyarakat misalnya : membuka lapangan pekerjaan yang besar dan tingkat kesejahteraan petani bisa tercukupi dengan petani tembakau.

Melihat permasalahan tersebut, tabiat menggunakan tembakau dalam bentuk rokok boleh dijadikan sebagai suatu contoh perkara samar dimana tidak ditemui nas yang khas menetapkan hukumnya. Adapun 2 macam jenis perokok yaitu perokok aktif dan perokok pasif adalah sebagai berikut:

a. Perokok aktif

Perokok aktif adalah seseorang yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas, daun, dan kulit jagung. Secara langsung mereka juga menghirup asap rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka. Tujuan mereka merokok adalah untuk menghangatkan badan mereka dari suhu yang dingin. Tetapi seiring berjalannya waktu pemanfaatan rokok disalah artikan, sekarang rokok dianggap sebagai suatu sarana untuk pembuktian jati diri bahwa mereka yang merokok adalah keren. ciri fisik perokok aktif adalah sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Merokok, cet -1*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007), h. 60.

- 1) Gigi kuning karena bahan nikotin
- 2) Kuku kotor karena nikotin
- 3) Mata perih
- 4) Sering batuk-batuk
- 5) Mulut dan nafas bau rokok

b. Perokok pasif

Perokok pasif adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok orang lain. Telah terbukti bahwa perokok pasif mengalami resiko gangguan kesehatan yang sama seperti perokok aktif, yaitu orang yang menghirup asap rokoknya sendiri. Adapun gejala awal yang dapat di timbulkan pada perokok pasif yaitu sebagai berikut:

- 1) Mata perih
- 2) Hidung beringus
- 3) Tekak yang serak
- 4) Pusing kepala

Apabila perokok pasif terus menerus”menekuni” kebiasaannya, maka akan mempertinggi gangguan kesehatan, seperti:

- 1) Kanker paru-paru
- 2) Serangan jantung dan mati mendadak
- 3) Bronchitis akut maupun kritis
- 4) Emfisema

## 2. Sejarah Rokok

Sekitar tahun 1492 M seorang pelaut terkenal yang bernama Chistoper Columbus telah menemukan benua Amerika. Ketika itu dia menyaksikan

penduduk setempat yaitu orang-orang Indian sedang asik menghisap lintingan tembakau yang sekarang kita kenal sebagai rokok. Pada saat itu rokok sudah merupakan suatu hal yang lazim dilakukan oleh penduduk asli di benua baru tersebut, yang sebenarnya pula orang Indian tersebut mengenalnya dari tetangga mereka, masyarakat Mexico.<sup>64</sup>

Karna terpengaruh kebiasaan ini lalu ia melakukannya sendiri dan memperkenalkannya ke benua Eropa. Pada abad ke -16 sejumlah pelaut Spanyol dan Portugis bersama-sama menanam tembakau di Hindia Barat dan Brazil. Paris mulai mengenal tembakau lewat Andre Thevet dan Jean Nicot pada tahun 1560, tepatnya pada tahun 1272 akhirnya Nicot menerbitkan buku yang pada halaman 478 dijumpai istilah Micotiane untuk menyebut jenis tanaman atau tembakau, dari sinilah istilah Nicotiane dipakai untuk menyebut tanaman obat tembakau itu. Maka sejak abad ke 16, Eropa dikenal dengan pohon-pohon tembakaunya dan kebiasaan masyarakat menghirup asap rokok.<sup>65</sup>

Mendekati abad ke 18 kebiasaan merokok mulai memberikan pengaruh pada negara-negara lain seperti Denmark, Swedia, Slovakia. Serta dinegara-negara Islam pada saat itu belumlah dikenal rokok dan pohon tembakau. Awal munculnya rokok dinegara-negara Islam adalah pada akhir tahun seribu dari tahun hijriah yang dibawa oleh orang-orang Nasrani, lalu menyebarlah rokok itu di Negara-negara Islam secara merata. Pada sekitar abad ke-17 sampai dengan sekitar abad ke-18, merokok masih menggunakan

---

<sup>64</sup> Aiman Husaini, *Tobat Merokok (Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok)*, (Depok: Pustaka Ilman, 2006), h. 15.

<sup>65</sup> Suryo Sukendro, *Op. Cit.*, H. 34-35.

pipa. Kemudian bergeser menjadi cerutu sekitar paruh pertama abad ke-19 rokok bergeser menjadi *cigarrete* seperti yang kita lihat saat ini.<sup>66</sup>

Kreatifitas perokok sepanyol dalam mengkonsumsi rokok dengan menggunakan kertas sigaret akhirnya diwujudkan dengan berdirinya pabrik rokok sigaret pertama kalinya sejak 1776 di Meksiko. Pada tahun 1860, rokok diproduksi dengan mesin yang disebut *peace cutter* dan pada tahun 1880 mesin ini diimpor oleh James Albert Benson yang berasal dari Virginia, Amerika.<sup>67</sup>

Di Indonesia sendiri, penggunaan tembakau sebagai rokok baru dikenal sejak kedatangan penjajah Eropa. Penjajah pada saat itu memperkenalkan dalam tembakau yang dikeringkan kepada bangsa kita. Awalnya kebiasaan ini masih dianggap aneh namun lama kelamaan tembakau sudah menjadi suatu yang didambakan oleh mayoritas penduduk di negeri ini karena zat adiktif yang ada pada rokok telah membuatnya kecanduan. Bahkan dari tahun 1990-1997, pertumbuhan jumlah perokok di Indonesia telah mencapai 44%, dan merupakan yang tertinggi di Dunia.

Perkembangan rokok sangat pesat dari awal ditemukannya sampai berkembang diberbagai lapisan dunia. Dilihat dari segi bungkusnya yang berawal terbungkus daun tembakau itu sendiri, kertas, klobor (daun jagung), daun aren. Dari segi bahan baku yang dipakai untuk pembuatan

---

<sup>66</sup> Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang mehalalkan atau mengharamkan)*, (Yogyakarta: Kutub, 2009), h.35.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h.78.



rokok pada awalnya hanya tembakau saja, kemudian ditambah dengan cengkeh dan adalagi yang di tambah dengan kemenyan.

Pada zaman sekarang rokok memiliki inovasi baru yakni roko elektrik. Rokok ini merupakan bentuk inovasi dari rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh BT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis beijing, RRC, yang saat ini dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd pada tahun 2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang muncul. Rokok elektrik di klaim menimbulkanbau dan asap. Selain itu rokok elektronik hemat dari pada rokok biasa karena bisa diisi ulang.<sup>68</sup>

Rokok pada zaman sekarang sudah banyak variasi mulai dari bentuk, campuran yang digunakan dan memiliki banyak rasa. Dengan berbagai inovasi tersebut tidak mengurangi efek negatif dan bahaya yang ada pada rokok tida berkurang sama sekali. Peringatan-peringatan yang tertera dalam setiap kemasan rokok yang semula hanya berbentuk tulisan dan sekarang dijadikan gambar-gambar yang cukup dapat memberi efek takut bagi yang melihatnya.

Akan tetapi pengkonsumsi rokok bukanya berkurang malah semakin bertambah banyak seluruh lapisan dunia. Rokok bukanlah menjadi hal yang jarang ditemui, meskipun banyak sekali terdapat racun yang ada didalam nya yang mampu untuk memasuki tubuh baik bagi perokok(perokok aktif)

---

<sup>68</sup> Rokok Elektronik, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik) diakses tanggal 21 febuari 2016.

maupun bagi non perokok (perokok pasif), racun yang ada pada rokok bukanlah racun yang ringan, akan tetapi bahaya yang diberikan berjangka panjang. Kesadaran pengkonsumsi rokok sangatlah sedikit tentang sesuatu yang membahayakan bagi tubuhnya. bahkan ada yang secara penuh tidak peduli akan hal itu , meskipun kerugiannya bukan hanya pada dirinya sendiri akan tetapi juga pada orang yang berada di sekitarnya.

### **3. Maslahat dan Mudharat Rokok**

#### **a. Maslahat Rokok**

Bagi pemerintah, industri rokok merupakan sumber pendapatan yang sangat penting artinya. Adapun manfaat dalam perekonomian dan pembangunan diantaranya:

##### **a) Lapangan pekerjaan yang luas**

Sejarah mencatat pada 1938 saja perusahaan rokok milik Nitisemito mampu menyerap 10.000 pekerja dan memproduksi 10.000.000 batang rokok per hari. Rokok yang di hasilkan oleh pabrik rokok dapat dikerjakan dengan mesin atau dengan tangan. Untuk mempertahankan tenaga kerja pemerintah memberikan cukai 20 kali lebih tinggi pada rokok mesin dibandingkan pada rokok tangan.

Belum lagi instansi dan perusahaan (di luar perusahaan rokok) yang berhubungan dengan kinerja mereka seperti jasa angkutan dan distribusi, masih pula ditambah dengan orang yang

menggantungkan hidup dari distribusi rokok langsung ke konsumen, seperti toko, warung-warung, hingga para pengecer rokok asongan.<sup>69</sup>

b) Cukai tembakau sebagai pemasukan kas negara

Cukai tembakau di kenal di Indonesia sejak tahun 1993 dan merupakan tiang penyanggah kas pemerintah Hindia-Belanda pada waktu itu. Departemen keuangan RI, pada 2003 tercatat 192, 33 miliar batang dengan penerimaan cukai Rp.26,30 triliun. Pada 2004 volume produksi rokok naik menjadi 203,87 miliar batang dengan penerimaan cukai Rp. 29, 17 triliun. Adapun penerimaan cukai rokok pada tahun 2007 tercatat 2009 naik 7%.

Berdasarkan data Departemen perindustrian jumlah produksi rokok dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 223 miliar batang pada 2004, menjadi 240 miliar batang pada 2008 peningkatan rata-rata 4,78% per tahun.<sup>70</sup>

Menteri perindustrian (periode 2004-2009) Fahmi Idris bahkan pernah mengungkapkan ironi industri rokok. Menurut dia, nilai setoran ke kas negara dari sektor ini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang disetor PT Freeport Indonesia, perusahaan multinasional asal Amerika Serikat. “dia (Freeport) sudah merusak lingkungan dengan membuat ‘kubangan raksasa’ dimana-mana.

---

<sup>69</sup> Suryo Sukendro, *Op. Cit.*, h.87.

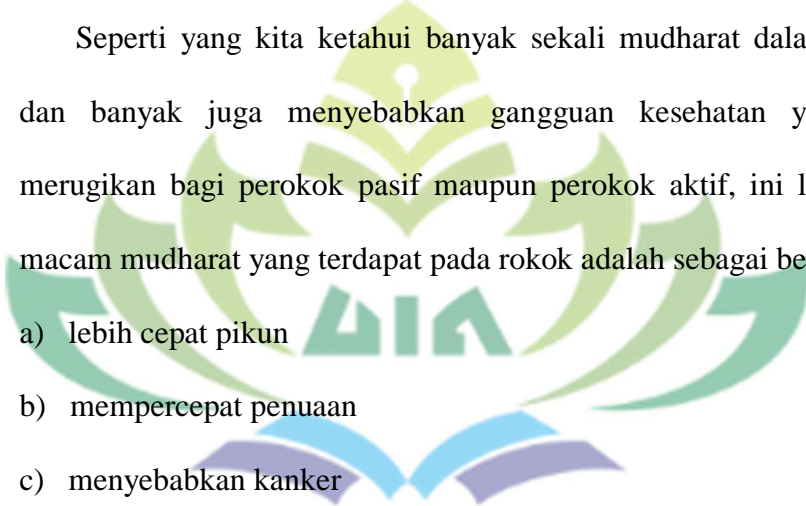
<sup>70</sup>NieceIndriet, Produksi Rokok Nasional Lampau Target  
<http://www.korantempo.com/06/07/2009,diakses> , 12 Oktober 2015

c) Devisa Ekspor

Kesemuanya itu adalah angka yang cukup signifikan bagi biaya pembangunan nasional. Dalam Roadmap sektor IHT (industri hasil tembakau), Departemen pemerintahan menetapkan target yakni jangka menengah (2004-2009) dan target jangka panjang (2010-2025). Dalam sasaran jangka menengah dan panjang, pemerintah berupaya mendorong peningkatan produksi rokok menjadi 240 miliar batang pada 2009.<sup>71</sup>

b. Mudharat Rokok

Seperti yang kita ketahui banyak sekali mudharat dalam merokok dan banyak juga menyebabkan gangguan kesehatan yang sangat merugikan bagi perokok pasif maupun perokok aktif, ini lah berbagai macam mudharat yang terdapat pada rokok adalah sebagai berikut:

- 
- a) lebih cepat pikun
  - b) mempercepat penuaan
  - c) menyebabkan kanker
  - d) serangan jantung
  - e) impotensi
  - f) gangguan kehamilan
  - g) mengurangi daya tanggap

**C. Hukum Rokok Dalam Islam**

Hingga saat ini, belum ada fatwa yang megharamkan tau yang menghahalkan rokok karena tidak ada petunjuk-petunjuk langsung dari

---

<sup>71</sup> Yusuf Waluyoaji, *Industri Rokok atau Racun*,( Jakarta: Binadaya Pres,1990), h.30.

al-Qur'an, Hadits-hadits Nabi maupun dari pendapat mazhab yang benar-benar langsung menetapkan hukum merokok. Dalam hal ini, hukum merokok tidak dijelaskan secara langsung seperti hukum minuman keras (bir dan sejenisnya), baik bagi peminum maupun penjual itu jelas haram.

Menurut fatwa MUI merokok itu haram karena rokok terdapat zat-zat yang sangat membahayakan bagi tubuh manusia sebagian. dari pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam asap rokok mengandung lebih dari 4000 racun yang terkandung dalam setiap hisapan. Dari racun tersebut menyebabkan banyak penyakit berbahaya yang akan diderita orang yang telah terkena asap dari rokok tersebut.
2. Rokok juga membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi ketagihan, karena didalam rokok terdapat sifat yang membuat setiap pengkonsumsinya menjadi ketagihan.
3. Asap rokok yang berbahaya tidak hanya berakibat terhadap perokok itu sendiri, akan tetapi juga akan berakibat bagi orang-orang disekitar perokok yang terkena asap tersebut.
4. Asap rokok yang dimatikan atau asap yang dikeluarkan dari ujung batang rokok akan menjadi asap tiga kali lebih berbahaya dari pada yang sedang dihisap atau yang dikeluarkan oleh perokok itu sendiri.
5. Rokok juga termasuk jenis pemborosan terhadap harta yang dimiliki, karena perokok akan selalu berusaha agar bisa memperoleh rokok meskipun harga rokok sangatlah mahal.

6. Merokok dapat meningkatkan sekresi asam lambung detwangan frekuensi dua kali lebih tinggi dari bukan perokok sehingga dapat memicu terjadinya tukak labung.<sup>72</sup>

Menurut fatwa Muhammadiyah hukum rokok itu haram menurut keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010. Dengan menggunakan beberapa alasan yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>73</sup> Metode yang digunakan adalah *bayani*, *ta'lili* dan *istislahi*. *Bayani* yaitu metode pendekatan kebahasaan. *Ta'lili* (rasionalistik) yaitu penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. *Istislahi* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.<sup>74</sup>

Menurut Fatwa NU ialah rokok merupakan suatu hal yang baru yang belum memiliki hukum secara pasti. Berkaitan dengan hukum rokok, NU tidak mengeluarkan edaran secara resmi seperti Muhammadiyah, namun masalah ini di senggung dalam Mukhtamar NU-2 yang terangkum dalam Ahkamul Fuqaha (kumpulan mukhtamar NU).<sup>75</sup> Dalam hal hukum makruh yang dikenakan pada rokok tidak serta merta harus dihukumi makruh yang mendekati keharaman, karena ada berbagai pertimbangan yang dijadikan landasan untuk mengimbangi hukum makruh tersebut,

---

<sup>72</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijma Ulama Fatwa se-Indonesia II/I), Cet-1*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h.207.

<sup>73</sup> Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. No.6/SM/MTT/III/2010. Tentang Hukum Merokok

<sup>74</sup> Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, metodologi dan aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.103.

<sup>75</sup> Lajnah Ta'lif wan Nasyr, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Khalista, 2000), h.28



sehingga kemakruhan tidak mendekati pada haram melainkan mendekati pada kebolehan atau nama lainnya adalah makruh tanzih.

**D. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Peraturan Daerah (PERDA) No. 05, LD.2018/NO.5 :

Menimbang:

- a. Bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bandar Lampung  
  
diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat.
- b. Bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat menyebabkan menurunnya kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik serta langsung maupun tidak langsung.
- c. Bahwa untuk mengendalikan dampak rokok terhadap kesehatan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- d. Bawah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengenai:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>76</sup>

Peraturan ini mengatur mengenai :

- 1) Ketentuan Umum
- 2) Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup
- 3) Hak dan Kewajiban
- 4) Penetapan Kawasan Tanpa Rokok
- 5) Peran Serta Masyarakat
- 6) Pembinaan dan Pengawasan
- 7) Tim Satuan Tugas Penerapan Kawasan Tanpa Rokok
- 8) Penyidikan
- 9) Sanksi Administratif
- 10) Sanksi Pidana
- 11) Ketentuan Penutup

Adapun sanksi pidana bagi pelanggar aturan Kawasan Tanpa Rokok

Sebagaimana sudah diatur dalam pasal 28 halaman 15 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, H. 16.

## 1. Sanksi Bagi Pelanggar Aturan Kawasan Tanpa Rokok

Sebagaimana sudah di atur dalam pasal 28 halaman 15 yaitu:

- a. Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Setiap pengelola KTR yang tidak melaksanakan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.
- e. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi penerimaan negara.

## 2. Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup KTR

- a. Azas penetapan KTR :

- 1) Kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara
- 2) Keterpaduan berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait
- 3) Partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung
- 4) Keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

b. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- 1) Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok
- 2) Membudayakan hidup sehat dan
- 3) Menekan angka pertumbuhan perokok pemula

c. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban, penetapan, larangan umum, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, Tim Satuan Tugas dan Sanksi.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>PERDA Kota Bandar Lampung Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 4



## E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Harda Wijaya yang berjudul “Faktor-faktor yang Berhubungan Perilaku Merokok Pada Remaja di RW 06 Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mencari tau faktor perilaku merokok dikalangan remaja. Sedangkan dalam metode penelitian ini adalah metode kualitatif dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara perilaku remaja perokok dengan faktor Orang Tua di RW. 06 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Tamangapa Menggala Kota Makassar dan adanya hubungan antar lingkungan dan kerabat yang dapat mempengaruhi seseorang agar melakukan kegiatan merokok. Menjadikan pengalaman yang berharga dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan serta memperluas wawasan pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok.

2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Masitha Nur Amalia yang berjudul “Analisis Pengaruh Konsumsi Rokok Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perokok terhadap produktivitas

tenaga kerja di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari produktivitas, konsumsi rokok, pendidikan, jenis kelamin, usia, status perkawinan dan kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari *Indonesia Family Life Survey 5* dengan 7099 responden terpilih. Teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini adalah variabel konsumsi rokok menunjukkan probabilitas tingkat kesalahan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang diharapkan ( $0,000 < 0,05$ ) maka variabel konsumsi rokok berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia.

3. Penelitian selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Ade Sulistiawan yang berjudul “ Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 ” Metode yang digunakan adalah survey yang bersifat deskriptif. Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan wawancara, observasi langsung.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah gambaran karakteristik siswa yang merokok di SMPN 3 Kota Tangerang Selatan 61 responden (95,3 %) biasa menghirup rokok berjenis putih atau filter dan hubungan ini dari lingkungan sosial. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh GYTS di Jakarta, Bekasi, dan Medan, didapatkan bahwa di Jakarta sebanyak 34,2 % murid sekolah usia SMP pernah merokok dan sebanyak 16,6 % saat ini masih merokok. Terdapat 33,4 % murid sekolah Bekasi pernah merokok dan sebanyak 17,6 % saat ini yang masih aktif merokok. Demikian di

Medan, sebanyak 39,7 % murid yang pernah merokok dan sebanyak 20,9 % yang merokok aktif. Kecenderungan peningkatan jumlah perokok remaja dan semakin mudanya usia mulai merokok tersebut menjadi menjadi keprihatinan sendiri karna membawa konsekuensi jangka panjang yang nyata yakni dampak negatif terhadap kesehatan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok di kalangan SMPN 3 Kota Tangerang Selatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al –Qur'an dan Hadits

Hadist yang ditakhrijkan oleh Al-Daruquthni, Juz 2.

Depatemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung:  
Diponegoro, 2012.

### Buku

Abu Lowis Ma'ruf, *Al-Munjid*, (Bairut: Daar al-Masyreq, 1973), h. 382.

Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)., h. 26.

Ahamad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Terjemahan oleh Agah Garnadi dari "The Early Development of Islamic Jurisprudence", Islamic Research Institute Pakistan, Islamabad, 1970)., Penerbit PUSTAKA ITB, 1405 H / 1984  
Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwaet: Al-Qalam, 1977 M / 1397H) ,h. 26.

Aiman Husaini, *Tobat Merokok (Rahasia dan Cara Empatik Berherti Merokok)*, (Depok: Pustaka Ilman, 2006), h. 15.

Ali Hasbillah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Al-Ma'arif 1992.

Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawa'id al'Fihiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.

Al-Zarqa', Muhammad bin Muhammad, *Syarbu al-Qawa'id al-Fiqbiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.

Amrullah Ahad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Amir Sarifiddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Pedana Media Grub, 2010

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Bustan M.N., *Epidemiologi Penyakit tidak Menular*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Depatemen Kesehatan Republik Indonesia, *Riset Kesehatan Dasar*, Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementerian RI, 2013.

Drs. Ahsin W. Alhafidz, M.A., *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007.

Dr. Bunyana Solihin, M.Ag, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.

Haizar MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Referensi Perpustakaan, 2013.

Haliman, *Hukum Pidana Syare'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Ibnu Taimiyah, *Syarbu Kitab al-Siyasati al-Syar'iyah*, Kairo: Mu'assanah al-Mukhtar, 2007.

Ilyus Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Jazuli H.A., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Bandung: Kiblat Press, 2002.

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM, 1995.

Jhon M. Echols dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983.
- Madzkur, Muhammad Salam, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, Kuwaet: Al-Ashriyyah, 1974.
- Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang mehalalkan atau mengharamkan)*, Yogyakarta: Kutub, 2009.
- Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijma Ulama Fatwa se-Indonesia III), Cet-I*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- P.Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surakarta: Pustaka Mandiri, 2006.
- Qutub Musthafa Sanu, Mu'jam Musthalahat, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dar al-Fikr al-Mu'ashir 2000.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif* Cetakan ke20, Bandung: Alfabeta Cv, 2014.
- Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS, 2006.
- Suryo Sukendro, *Filosofi Merokok, cet -I*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007.
- Tobacco, *Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Control Suport Center, 2010.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam Cet. 1.*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ulwan, Isma'il bin Hasan bin Muhammad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Khams al-Kubra*, Yogyakarta: Dar Ibn al-jauzi, 1429.
- Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialogdan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- W.J.S. Poerwardarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah, ter: Arif Munandar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.



Yusuf Waluyoajati, *Industri Rokok atau Racun*, Jakarta: Binadaya Pres, 1990.

Zaiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Ta'alif, 1964/1965.

Zainuddin Ali, *Sumber Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### **Jurnal**

SOEPRA, *Jurnal Hukum Kesehatan*, vol. 2 No. 1 Th. 2016, h. 15.

### **Wawancara**

Sekretaris Satpol PP Kota Bandar Lampung, Wawancara Dengan Penulis, Kantor Satpol PP Bandar Lampung, Bandar Lampung, 05 Februari 2020.

Kepala Perda Satpol PP Kota Bandar Lampung, Wawancara Dengan Penulis, Kantor Satpol PP Bandar Lampung, Bandar Lampung, 01 Februari 2020.

Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung, Wawancara Dengan Penulis, Kantor SatpolPP Bandar Lampung, 02 Februari 2020

Kasubag Program dan Informasi Satpol PP Bandar Lampung, Wawancara Dengan Penulis, Kantor SatpolPP Bandar Lampung 2 Februari 2020

Kabag Umum dan Kepegawaian SatpolPP Kota Bandar Lampung, Wawancara Dengan Penulis, Kantor SatpolPP Bandar Lampung, 3 Februari 2020

### **Sumber Online**

NieceIndriet, Produksi Rokok Nasional Lampau Target <http://www.korantempo.com/06/07/2009,diakses> , 12 Oktober 2015

Rokok Elektronik, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik) diakses tanggal 21 februari 2016.

### **Undang - Undang**

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, H. 16.

PERDA Kota Bandar Lampung Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 4

